SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Dalam Perkara Perceraian**

Khoirul Faridah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

khoirulfarida@gmail.com

Abstrak:

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pengadilan agama dan pengadilan negeri menarik untuk diteliti. Artikel ini membandingkan implementasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang mencakup perbedaan seperti pelayanan publik, proses beracara, dan putusan. Tujuan dari penelitian mendeskripsikan implementasi dan menganalisis perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diterapkan secara efektif pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. 2). Ada perbedaan terlihat pada putusan, yang mana proses persidangan pada Pengadilan Agama dipengaruhi oleh doktrin-doktrin islam sehingga putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga teori Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri, dalam penggalan fakta hukum oleh hakim cenderung menggunakan asas keadilan yang ditekankan dalam pembentukan putusan.

Kata Kunci: perbandingan; implementasi; perempuan; perceraian.

Pendahuluan

Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dan turunannya telah banyak dibentuk sebagaimana agar bisa melindungi perempuan dengan baik, tetapi perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam meraih pemenuhan hak dikarenakan

pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Oleh karena itu, untuk menghindari perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Karena semakin perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.¹ Dalam tataran seperti ini, hukum acara yang kodratnya selalu mengabdikan kepada hukum materiil seharusnya mengikuti sifat perkembangan, keunikan, dan keanekaragaman hukum materiil untuk menjaga keseimbangan keadilan hukum yang dipikul oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung).²

Untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Hukum dan turunannya telah banyak dibentuk sebagaimana agar bisa melindungi perempuan dengan baik, tetapi perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam meraih pemenuhan hak dikarenakan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Sehingga tanggal 4 Agustus 2017 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekadjahjana menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk menguatkan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, karena seringkali dalam berhadapan dengan hukum, perempuan mendapatkan diskriminasi ganda.³ Artinya perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pihak berperkara dalam kasus perdata perceraian itu mendapatkan diskriminasi lain dari para hakim saat perempuan diperiksa kasusnya secara hukum. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, lembaga Mahkamah Agung pengadilan tertinggi

¹Sulistyo Irianto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 98.

²Ahmad Kamil & Fauzan, M. *Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6.

³Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 85.

berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi dalam praktik peradilan di Indonesia.⁴

Untuk memperkaya pembahasan serta membedakan dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mempunyai tiga jurnal dan artikel yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.⁵ Dibahas dalam jurnal Nur Ilmiah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini membahas implementasi perlindungan hukum pada wanita dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebelum hingga sesudah dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017. Dalam jurnal ini juga membahas tentang jaminan perlindungan yang didapatkan perempuan dari sikap diskriminasi, dan gender sesudah sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami.⁶ Penelitian ini membahas tentang asas dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang mana peran hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan implementasinya di pengadilan agama pada kasus perizinan poligami prespektif Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penyelesaian perkara dipengadilan agama. Penelitian lapangan ini menghasilkan temuan pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama yang merupakan ketentuan bersifat hukum acara yang termasuk peraturan pendukung UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Serta pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sidoarjo sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan bentuk standarisasi bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan izin poligami.

Analisis Masalah terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁷ Dalam skripsi ini juga menjelaskan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan

⁴Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, 112.

⁵Nurul, Ilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3172>

⁶Siti Ainun Makiyah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/30404/>

⁷Silmi Mursidah, Mursidah, Silmi, "Analisis Masalah Terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27485/>

manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, seperti dalam masalah daruri, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research) terdapat temuan latar belakang dibnetuknya aturan ini serta analisis masalah pada peraturan ini.

Dari penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa ada perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Persamaannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tetapi ada perbedaan secara spesifik dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian di dua pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dimana artikel akan menerangkan perbedaan dan persamaan kedua lembaga tersebut dalam menangani perkara perceraian, bagaimana hak-hak perempuan pada saat dalam proses perceraian hingga akhir putusan yang diberikan pada perempuan.

Karena seringkali dalam proses penanganan perkara sering kali ditemukan semacam stereotip perlakuan yang diskriminatif. Pada Pengadilan Negeri diskriminasi pada perempuan sering terjadi pada pihak perempuan yang mengajukan gugatan, ketidakadilan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan mengakibatkan perempuan tidak bisa mengurus perceraian yang diajukannya. Sehingga putusan tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang sudah pasti tidak memenuhi keadilan kepada kedua pihak berperkara. Pada Pengadilan Agama pada cerai gugat perempuan tidak juga mendapatka haknya dengan adil. Dalam cerai talak, pertimbangan hukum terdapat amar pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, akan tetapi kurang itu maksimal. Pembayaran nafkah yang dilaksanakan setelah ikrar talak mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan haknya, karena pihak mantan suami belum membayarkannya hingga beberapa setelah selesai masa *iddahnya*.

Hak laki-laki dan perempuan setara di dalam hukum, sehingga ketika terjadi tindak diskriminasi dan ketidakadilan pada perempuan itu adalah hal yang tidak benar. Kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi diberbagai bidang. Dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di pengadilan, perempuan berhak mengajukan gugatan, perempuan berkesempatan melakukan replik duplik, berkesempatan menggunakan saksi untuk memperkuat fakta yang dia ajukan.

Penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2017 adalah 380 perkara perceraian, dimana jumlah perkara cerai talak 106 dan cerai gugat 274. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kota Madiun mengalami kenaikan yaitu berjumlah 422 perkara perceraian, 120 cerai talak dan 302 cerai gugat. Dan pada tahun 2019 perkara perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kota Madiun mengalami penurunan yaitu

berjumlah 412 perkara perceraian, 109 perkara cerai talak dan 303 cerai gugat. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara perceraian pada tahun 2017 berjumlah 26 perkara cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Madiun meningkat menjadi 28 perkara dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sehingga menjadi 34 perkara cerai gugat. Dalam KUHPerdara Buku I Bagian 3 Perceraian Perkawinan Pasal 217 suami atau istri, yang mengajukan gugatan baru atas dasar suatu sebab baru yang timbul setelah perdamaian, boleh mempergunakan alasan-alasan yang lama untuk mendukung gugatannya. Sehingga pihak istri ataupun pihak suami berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri yang biasa disebut dengan perkara gugat cerai. Dari data tersebut terlihat bahwasanya perkara cerai gugat dari pihak perempuan lebih dominan, sehingga perlu pengawasan atas kesetaraan pada pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, atau sedang menjalankan proses persidangan. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak hanya pada proses persidangan, tetapi juga pelayanan publik, proses persidangan dan juga putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika yang berada di Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan pembahasan. data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 seperti yang ada pada literatur Al-Qur'an Hadits dan buku-buku tentang implementasi peraturan dan buku yang lainnya yang berkaitan dengan proposal skripsi ini. Pengeolahan Data setelah data yang dibutuhkan terkumpul Untuk Menyusun data-data Tersebut agar Menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan Langkah-langkah sebagai berikut ini (1) Pemeriksaan data (*editing*); (2)Klasifikasi (*Classifying*);(3) Analisis (*Analizing*);dan (4) Kesimpulan (*Concluding*). Penentuan subjek dengan penentuan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah untuk memudahkan pemilihan subjek dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian.⁸

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Perkara Perceraian

Dalam praktiknya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sangatlah luas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Bab III berisi tentang proses berperkara dimana pelayanan publik, pemeriksaan perkara, hingga putusan dalam mengadili perkara perceraian termasuk dalam pengimplementasian Peraturan

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 91.

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Seperti yang telah disampaikan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa perma bukan hanya hasil dari putusan hakim, tetapi bagaimana perempuan berperkara datang, proses persidangan, hingga mendapatkan keputusan yang adil dan non diskriminasi itu adalah implementasi perma yang telah di implementasikan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Kasus yang mendominasi di Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan perkara perceraian, dimana cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Hal tersebut juga terjadi di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa banyak kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Dengan alasan perempuan difasilitasi dalam menegakkan keadilan, dimana setiap pengadilan telah menyediakan pos bantuan hukum. Sehingga pos bantuan hukum ini sangat membantu perempuan-perempuan dalam mengajukan perkara pada pengadilan.

Implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 2 tidak hanya pada proses persidangan saja, tetapi dari mulai perempuan masuk pengadilan, pelayan publik yang diberikan pada perempuan yang sedang menyelesaikan perkara di pengadilan, pemeriksaan perkara dalam proses persidangan, hingga dalam putusan yang menjadi produk hukum. Begitu dalamnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam menjaga hak-hak perempuan. Kemudian telah disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang sedang menghadapi proses hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dimana dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menangani perkara perempuan yang sedang menjadi pihak berperkara.

Dari mulai konsultasi, pembuatan surat, alur persidangan semua akan informasi tentang jalannya persidangan bisa didapatkan. Adanya pelayan terpadu satu pintu juga mempermudah pihak berperkara dalam mendaftarkan kasusnya pada pengadilan. Luasnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya pada pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga pada proses pemeriksaan perkara dan putusan. Penerapan pada pos bantuan hukum sangat membantu para pihak berperkara yang memerlukan bantuan. Selain pos bantuan hukum. Selain bantuan dari pengadilan sebelum berperkara pengadilan juga memudahkan pendaftaran bagi pihak yang akan mengajukan perkaranya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan terobosan terbaru pengadilan dalam memudahkan pihak berperkara dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 2 tujuan PTSP yaitu: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Selain pendaftaran, pengadilan juga menyediakan fasilitas yang menjamin kenyamanan para pihak berperkara, terutama perempuan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan: Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam pelayanan publik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat awam atau bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan pada Pasal 4 ayat (3) penyediaan posbakum pengadilan. Pos bantuan hukum adalah salah satu fasilitas

yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama, dimana dengan adanya posbakum ini sangat memudahkan para pencari keadilan, terutama untuk perempuan atau orang-orang yang buta hukum. Adanya posbakum menjadi salah satu bentuk dari pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam pelayanan publik kenyamanan memang hal pertama yang harus didapatkan, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pihak berperkara. Adanya aturan ini memberikan kemudahan untuk para pihak berperkara untuk konsultasi, keterbukaan informasi ini mempermudah para pihak mendapatkan keadilan tanpa perlu khawatir tidak memahami proses persidangan. Kenyamanan memang hal pertama yang harus didapatkan dalam pelayanan publik, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pihak berperkara. Menurut salah satu anggota posbakum di pengadilan agama kota Madiun Rishandayono Sukarno S.H. adanya keterbukaan informasi memberikan ruang untuk mempermudah para pihak berperkara untuk konsultasi, memberikan masukan, juga dalam pembuatan dokumen yang diperlukan dalam persidangan secara gratis dan mudah karena adanya akses online yang disediakan di *website* Pengadilan Agama Kota Madiun.

Implementasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang juga memfasilitasi posbakum untuk memudahkan para pihak berperkara. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pembuatan dokumen surat gugatan atau surat permohonan, karena akan dibantu oleh posbakum secara gratis. Sehingga adanya pos bantuan hukum ini sangat membantu para pihak berperkara yang ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Kemudian setelah pelayanan publik artikel ini membahas proses persidangan dimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 proses pemeriksaan perkara pada BAB III Pasal 4 memerintahkan agar hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Kemudian pada Pasal 5 hakim dilarang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Kemudian ada pada Pasal 7 hakim harus menegur atau mencegah para pihak berperkara yang bersikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum selama proses pemeriksaan persidangan.

Pada pemeriksaan perkara, di dalam persidangan hakim memeriksa perkara dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk meperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria.⁹ Implementasi tujuan peraturan ini menjamin akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan itu bisa akses informasi, akses pelayanan, hingga keadilan saat mendapatkan putusan. Dalam substansinya cerai talak yang mana seorang isteri menjadi sebab perselisihan dan

⁹Sulistiyowati, *Perempuan dan Hukum*, 124.

pertengkaran, dalam proses pemeriksaan perempuan juga terbukti melakukan perselingkuhan, sehingga hakim memutuskan untuk tidak memberi nafkah *iddah* karena nusyuznya perempuan berselingkuh, tetapi hakim tetap memberikan nafkah *mut'ah* untuk istri tersebut. Di Pengadilan Agama kota Madiun, ikrar talak dilakukan saat pihak laki-laki sudah memberikan semua kewajibannya terhadap mantan istrinya. Sehingga sidang ikrar talak dapat ditunda sampai pihak laki-laki membayar kewajiban nafkah pada mantan istri.

Sebelum ada peraturan ini, perempuan tidak mempunyai payung hukum yang pasti, adanya perma ini akhirnya hakim menemukan penemuan-penemuan hukum dalam kasus perceraian khususnya pemberian nafkah dan juga hak-hak mantan istri yang terdapat pada turunan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama. Sehingga aturan ini berdiri untuk melindungi secara hukum hak-hak yang harus diperoleh perempuan. Dimana cerai talak menimbulkan akibat membayar kewajiban kepada istri nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, selama istri tidak *nyusuz*. Disampaikan juga misalnya hak nafkah untuk perempuan tidak muncul di mediasi hakim secara *ex officio* menentukan hak yang harus didapatkan oleh istri tersebut. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh pihak yang berperkara. Hak-hak yang seharusnya didapatkan pada perempuan harus dilindungi dengan hukum yang mempunyai kekuatan. Seperti pada perkara cerai talak, tidak ada *amar* yang memerintahkan kepada Pemohon atau pihak suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan. Namun setelah adanya aturan ini suami boleh membayar kewajibannya sebelum atau sesudah melaksanakan pengucapan ikrar talak. Jadi dalam praktiknya suami harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah kepada istri sebelum atau sesudah pengikraran talak, jadi jaminannya adalah akta cerai. Sehingga akta cerai tidak akan diberikan sebelum suami menyelesaikan pembebanan nafkah tersebut.

Pada Pengadilan Agama dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat akan menjalani masa *iddah*, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut peneliti untuk mempraktikkan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Buku II. Dimana Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.¹⁰ Dengan pertimbangan hak dan wewenang hakim dalam perkara cerai gugat ini, hakim memutuskan memberi nafkah *iddah* dengan hak *ex officio* karena penggugat terbukti tidak melakukan *nusyuz*. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Syarifah Isnaeni S.Ag., M.H. bahwa "kalau dulu memang tidak ditentukan kalau para pihak itu tidak meminta, tetapi kalau sekarang kita para hakim bisa menentukan tanpa ada permintaan dari pihak. Biasanya 'kan itu muncul saat mediasi, walaupun tidak hakim

¹⁰Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010 (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), 152.

mempunyai hak ex officio yang bisa menentukan nafkah yang akan ditaanggungkan kepada suami.”¹¹

Cerai gugat bagi mantan istri pasca perceraian masih mendapatkan haknya secara untuh terkecuali mantan istri tersebut terbukti melakukan *nusyuz*. Tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 benar-benar menjamin keadilan bagi hak-hak perempuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memiliki turunan pada Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang digunakan pada Pengadilan Agama.

Begitu juga pada proses pemeriksaan di pengadilan negeri, dalam mengulik fakta didalam sidang hakim menyetarakan status social, diskriminasi, dampak psikis dari pihak perempuan, sehingga persidangan berjalan dengan adil dan tidak ada diskriminasi pada perempuan. Sehingga adanya perma ini adalah turunan dari KUHP sebagai penegas, namun perma ini dikhususkan untuk perempuan. Disini hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengendalikan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang dikehendaki Undang-Undang. Misalnya seorang perempuan berhadapan dengan hukum, kalau itu terkait pihak berperkara sebagai penggugat, hakim memberikan hak mengajukan gugatan dan mengajukan saksi dan bukti untuk membenarkan apa yang didalilkan. Kalau tergugat perempuan hakim juga memberikan hak yang sama untuk menyangkal, memberikan saksi dan bukti untuk menguatkan sangkalannya, itu yang dinamakan non-diskriminasi dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan semua orang sama di mata hukum, dimana penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama, sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar karena tidak ada diskriminasi terhadap pihak berperkara.

Hak-hak pihak berperkara telah diberikan secara adil tanpa adanya diskriminasi dan kesetaraan gender. Sehingga perempuan yang sedang menjalankan proses persidangan tidak perlu khawatir, karena hak-haknya akan terpenuhi. Semua pihak berperkara berhak mengajukan gugatan, mengajukan saksi, mengajukan bukti, sedangkan untuk tergugat berhak berkesempatan untuk menjawab dan menyangkal, membuktikan untuk membantah yang didalilkan penggugat, karena dalam pemeriksaan perkara hakim menggali nilai-nilai kearifan lokal, mempertimbangkan kesetaraan gender, dan menggali nilai-nilai hukum tanpa diskriminasi. Dan akan terlihat apa penyebab keretakan rumah tangga dalam kasus perceraian, dengan mengorek informasi mengikuti alur cerita dari saksi saat pembuktian, sehingga nantinya akan terlihat kebenaran dari semua yang didalilkan oleh para pihak berperkara.

Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim di lakukan penuh dengan kecermatan dan ketelitian. Keadilan ada dua macam, keadilan materil dan keadilan *procedural*, keadilan *procedural* sendiri adalah proses dalam persidangan. Untuk perceraian Pengadilan justru sama rata, tidak membedakan laki-laki atau perempuan yang sebagai penggugat, intinya dimana seseorang mendalilkan para pihak harus membuktikan. Tidak peduli

¹¹Syarifah Isnaeni (Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun), hasil wawancara, 30 Januari 2020.

laki-laki atau perempuan, perempuan sebagai penggugat atau tergugat mempunyai hak yang sama yaitu mengajukan gugatan, mengajukan bukti, alat bukti, mengajukan jawaban, bebas membantah dan menyangkal, mengajukan bukti dan saksi, itu keadilan secara *procedural* sudah diimplementasikan.

Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Perkara Perceraian

Persamaan implementasi peraturan ini adalah dalam pelayanan publik yang mana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah memberikan pelayanan secara maksimal dalam proses pendaftaran menggunakan PTSP, ketersediaan pos bantuan hukum, dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kenyamanan pihak yang sedang berperkara. Kemudian mengenai pendaftaran, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini juga berlaku dalam tahap pertama yaitu pendaftaran yang dimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 2 tujuan PTSP yaitu: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pada setiap pengadilan tingkat pertama memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹² Setelah melakukan wawancara dengan salah satu advokat yang menjaga pos bantuan hukum Rishandayono Sukarno S.H. menyampaikan bahwa *“Konsultasi disini gratis, kita bisa buat surat gugatan, surat permohonan, bisa juga duplik atau jawaban tertulis yang mau disidangkan. Jadi mengenai informasi bisa kita konsultasi, jadi kita kasih saran bikin surat gugatan, surat permohonan, tanpa ada diskriminasi dan gratis. Asalkan dalam kasus yang rumit itu juga bisa gratis asalkan memenuhi persyaratan yang jadi untuk orang-orang yang benar-bener tidak mampu.”*¹³ Posbakum bisa memberikan informasi, konsultasi tentang proses beracara, dan juga memberikan masukan saat para pihak anak menghadapi proses persidangan termasuk pembuatan surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik dan semua yang para pihak perlukan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pemerintah memberikan fasilitas secara gratis pada para pihak yang akan beracara, sehingga tidak perlu lagi khawatir ketika ingin beracara. Dalam implementasi di lapangan, Pelayan terpadu satu pintu ini telah dijalankan oleh pengadilan agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Selain pelayanan terpadu satu pintu, pos bantuan hukum juga telah disediakan di setiap pengadilan tingkat pertama. Dalam pelayanan publik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat awam atau bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan pada Pasal 4 ayat (3) penyediaan posbakum pengadilan.

¹²Sovia, Hasanah “Cara Mengajukan Hukum ke Posbakum di Pengadilan,” *Hukum Online*, 14 Agustus 2018, diakses tanggal 22 Desember 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/>

¹³Rishandayono Sukarno (Advokat), hasil wawancara, 29 Januari 2020.

Untuk kenyamanan pihak berperkara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun menyiapkan fasilitas-fasilitas ramah perempuan seperti ruang *laktasi*, ruang bermain anak, dan juga kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Panitera Drs. Khusnul Salim bahwa “*Secara umum implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sudah dilakukan dengan baik, semua fasilitas disini benar-benar sudah sesuai dengan zona intergritas yang ada. Contohnya apa? Contohnya fasilitas ruang bermain anak dan ruang ibu menyusui, kamar mandi perempuan dan laki-laki yang berbeda. Menurut saya semua itu adalah untuk memberikan kenyamanan pada perempuan*”¹⁴ Dalam pelayanan publik nyaman memang hal pertama yang harus didapatkan, semua fasilitas dipenuhi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pihak berperkara. Selain itu untuk melindungi hak-hak perempuan adalah ruang menyusui dan juga ruang bermain anak, adalah tempat yang privat untuk perempuan, dimana perempuan akan merasakan nyaman saat kebutuhannya dipenuhi. Begitu juga kamar mandi yang berbeda, jadi ada kamar mandi untuk perempuan dan kamar mandi untuk laki-laki. Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama dan pengadilan negeri kota Madiun telah menerapkan peraturan ini dengan baik.

Setelah pelayanan publik, persamaan dalam implementasi pada peraturan ini ada pada proses persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah mengatur proses pemeriksaan perkara pada BAB III Pasal 4 memerintahkan agar hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Kemudian pada Pasal 5 hakim dilarang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Sehingga hakim tidak boleh menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan bahkan mengintimidasi, kemudian hakim juga tidak boleh membenarkan terjadinya deskriminasi pada perempuan menggunakan kebudayaan, aturan adat, maupun menggunakan penafsiran lain yang bias gender, kemudian pada kasus kesusialaan hakim tidak boleh mempertimbangkan latar belakang seksualitas korban untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan mengeluarkan pernyataan dan pandangan stereotip gender. Dari hasil penelitian implementasi peraturan ini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun telah menerapkan peraturan ini secara maksimal karena akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan itu bisa akses informasi, akses pelayanan, hingga keadilan saat mendapatkan putusan.

Seperti yang disampaikan oleh hakim senior Syarifah Isnaeni, S.H. yang pernah menangani kasus nafkah dengan perempuan sebagai penggugat, namun tetap mendapatkan nafkah. Adanya peraturan ini banyak hakim yang melakukan penemuan terhadap kasus-kasus perceraian dibidang perkawinan tentang hak-hak perempuan setelah diceraikan, sehingga adanya peraturan ini sebagai payung hukum dan penguat hak-hak perempuan yang semakin terjamin. Dalam substansinya cerai talak yang mana seorang isteri menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran, dalam proses pemeriksaan perempuan juga terbukti melakukan perselingkuhan, sehingga hakim memutuskan untuk tidak memberi nafkah *iddah* karena nusyuznya perempuan berselingkuh, tetapi hakim tetap memberikan nafkah *mut'ah* untuk istri tersebut. Di Pengadilan Agama kota Madiun, ikrar talak dilakukan saat pihak laki-laki sudah memberikan semua kewajibannya

¹⁴Khusnul Salim (Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun), hasil wawancara, 29 Januari 2020.

terhadap mantan istrinya. Sehingga sidang ikrar talak dapat ditunda sampai pihak laki-laki membayar kewajiban nafkah pada mantan istri.

Implementasi dari peraturan ini juga menjelaskan agar hakim menanyakan kerugian dampak dan kebutuhan untuk pemulihan, sehingga hakim memberikan masukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai pihak berperkara untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak perempuan. Dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak telah adanya perintah dari majelis hakim didalam amar putusannya mengenai pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal menunjukkan bahwa peraturan ini memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi wanita dari kesulitan tanpa harus mengajukan eksekusi. Dan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun telah menerapkannya. Sehingga hakim selalu menyampaikan pada termohon kasus cerai talak atau kepada pihak isteri bahwa perempuan mempunyai hak nafkah. Membriterrakan masukan pada pihak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum bukan berarti hakim impersial, tetapi hanya memberitahu hak yang dimiliki untuk membantu para pihak agar proses berperkara berjalan dengan lancar, bukan berarti hakim tidak disparitas, namun demi kelancaran proses persidangan, karena umumnya hakim mempunyai kode etik dalam melaksanakan profesinya sehingga batasan-batasan tersebut sudah dilaksanakan oleh para hakim.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun juga mengimplementasikan peraturan ini pada putusan yang telah inkraclit. Seperti pemaparan dalam analisis diatas bahwa para hakim sudah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung itu dengan baik, bukti nyatanya adalah hasil dari pertimbangan hakim saat mengadili perkara perempuan yang telah tercantum dalam putusan, karena bukti dari implementasi perma perempuan ini ada pada putusan. Sehingga peran hakim dalam mempertimbangkan dan mengkaji dalil dan bukti yang disampaikan saat proses pemeriksaan akan mempengaruhi hasil putusan, sehingga pentingnya proses pemeriksaan perkara yang adil, non diskriminasi dan menjunjung kesetaraan gender akan berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim.

Seperti yang telah disampaikan oleh hakim Alfian Yusuf, S.H. bahwa hakim selalu menyampaikan pada pihak perempuan dalam perkara perceraian apa saja hak-hak yang dimiliki. Karena tugas daripada hakim selain mengadili perkara dia juga memberikan informasi membantu para pihak agar pelaksanaan proses berperkara supaya lancar, terlepas hak itu digunakan atau tidak. Dalam perkara perceraian hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karna jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.¹⁵ Hakim juga bisa menawarkan ataupun secara hak *officio* (menetapkan secara langsung) meskipun para pihak tidak meminta. Karena dipandang bahwasanya perlu kepastian hukum, perlu pemenuhan hak-hak bekas istri itu hakim bisa secara jabatannya. Sehingga jika perempuan menginginkan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak.

Begitu pula dalam menegakkan keadilan, tidak cukup dengan Undang-Undang saja. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara dituntut untuk memberikan putusan

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.

yang adil dan memberikan maslahat bagi para pihak dan umat. Seperti pada perkara Perceraian hakim sudah melakukannya seperti yang dijelaskan dalam paparan data kemaslahatan bagi para pihak dalam hal melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, lampau, nafkah anak, dan nafkah yang lain. Contoh implementasi yang diterapkan hakim di Pengadilan Agama pada perkara perceraian dimana hakim dapat menghukum laki-laki secara *ex officio* untuk membayar nafkah yang wajib diberikan kepada istri pasca perceraian. Disini menunjukkan bahwasanya perlindungan hak-hak demi kemaslahatan para pihak secara adil. Pada saat ikrar talak suami belum mampu membayar kewajibannya terhadap mantan isterinya maka persidangan akan ditunda sampai suami melunasi kewajibannya kepada isteri. Dengan hak *ex officio* juga hakim memberikan nafkah *mut'ah* dan menolak nafkah *iddah* karena perempuan terbukti *nusyuz* dalam persidangan. Sehingga dalam proses mengadili perkara akan berpengaruh pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama .

Begitu pula pada pengadilan negeri dalam proses pemeriksaan terhadap pihak berperkara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki tiga Pasal yang mengatur proses pemeriksaan, yaitu pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dimana dalam pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan tidak setara dengan status social antara pihak berperkara serta ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, relasi kuasa, dan juga riwayat kekerasan pihak berperkara. Dalam mengulik fakta didalam sidang hakim menyetarakan status social, diskriminasi, dampak psikis dari pihak perempuan, sehingga persidangan berjalan dengan adil dan tidak ada diskriminasi pada perempuan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam proses pemeriksaan perkara hakim harus bertindak sesuai pedoman yang sudah ada, dimana hakim memberikan hak yang sama kepada para pihak berperkara. Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengendalikan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang dikehendaki Undang-Undang.¹⁶ Seperti yang disampaikan hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Ni Kadek Kusuma Wardani bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun sudah mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang mana kesetaraan gender dan non-diskriminasi telah dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara. Misalnya seorang perempuan berhadapan dengan hukum, kalau itu terkait pihak berperkara sebagai penggugat, hakim memberikan hak mengajukan gugatan dan mengajukan saksi dan bukti untuk membenarkan apa yang didalilkan. Kalau tergugat perempuan hakim juga memberikan hak yang sama untuk menyangkal, memberikan saksi dan bukti untuk menguatkan sangkalannya, itu yang dinamakan non-diskriminasi dalam proses persidangan. Sehingga dalam proses persidangan semua orang sama di mata hukum, dimana penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama, sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar karena tidak ada diskriminasi terhadap pihak berperkara.

Penerapan implementasi peraturan ini telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dimana hak-hak pihak berperkara telah diberikan secara adil tanpa adanya

¹⁶Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H.,M.H., *Hukum, Moral Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 79.

diskriminasi dan kesetaraan gender. Sehingga perempuan yang sedang menjalankan proses persidangan tidak perlu khawatir, karena hak-haknya akan terpenuhi. Semua pihak berperkara berhak mengajukan gugatan, mengajukan saksi, mengajukan bukti, sedangkan untuk tergugat berhak berkesempatan untuk menjawab dan menangkal, membuktikan untuk membantah yang didalilkan penggugat. Dalam pemeriksaan perkara hakim menggali nilai-nilai kearifan lokal, mempertimbangkan kesetaraan gender, dan menggali nilai-nilai hukum tanpa diskriminasi. Dalam memberikan keadilan yang sama dimata hukum, hakim akan melakukan pemeriksaan secara detail. Sehingga akan terlihat apa penyebab keretakan rumah tangga dalam kasus perceraian. Selama proses pemeriksaan perkara hakim akan mengorek informasi mengikuti alur cerita dari saksi saat pembuktian, sehingga nantinya akan terlihat kebenaran dari semua yang didalilkan oleh para pihak berperkara.

Sedangkan dalam mengadili perkara perceraian pada Pengadilan Negeri hakim secara substansi menggunakan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H. juga menyampaikan bahwa “*prinsip Pengadilan Negeri hanya mengabulkan apa yang diminta, tidak boleh melebihi yang diminta. Sehingga jika dalam gugatan tidak membahas dalil, maka hakim tidak akan memberikan.*”¹⁷ Karena siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Karena mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.¹⁸ Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Dalam putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang dikeluarkan juga sudah menerapkan implementasi perma ini, namun hasil putusan cenderung menggunakan asas keadilan dalam menegeluarkan putusan. Contoh implementasinya perkara perceraian dimana pihak perempuan sebagai penggugat dan laki-laki sebagai tergugat yang tidak ingin bercerai. Setelah proses pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada niat memperbaiki diri dan usaha untuk kembali pada isteri. Sehingga hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh isteri. Kemudian perkara perceraian kedua penggugat adalah laki-laki yang ingin menceraikan isterinya, diaman tergugat atau istri tersebut masih mencintai suaminya dan bertahan dari perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh pihak penggugat. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim memutuskan tidak mengabulkan gugatan penggugat karena perselisihan yang didalilkan penggugat hanya masalah tempat tinggal yang masih bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Kesimpulan

¹⁷Ni Kadek Kusuma Wardani (Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun), hasil wawancara, 27 Januari 2020).

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 801-802.

Pertama, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan diimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka hak-hak perempuan yang masih sering dikesampingkan akan terlindungi dengan baik, dari mulai perempuan masuk pengadilan, sampai keluarnya putusan atau produk hukum dari Lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Sehingga dalam pelayanan publik, proses persidangan, hingga putusan dapat dilaksanakan seadil-adilnya tanpa diskriminasi oleh pihak lain. Dalam proses persidangan terdapat pemeriksaan perkara yang dimana pembuktian dan keputusan hakim sangat berpengaruh pada hasil putusan yang adil dan non diskriminasi. Bukti dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ada pada putusan yang telah ditetapkan oleh para penegak keadilan.

Kedua, Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun memiliki kesamaan pada pelayanan publik yaitu ketersediaan pos bantuan hukum, PTSP, dan fasilitas yang dimiliki. Kesamaan pada proses persidangan, dalam pemeriksaan pada Pasal 4,5, dan 7. Dalam pasal 6 mengadili dan dalam pasal 8 memberitahu hak yang dimiliki oleh perempuan. Kesamaan dalam mengizinkan pendampingan pada proses persidangan dan sama belum pernah melakukan sidang secara audio visual. Namun perbedaan ada pada proses persidangan dalam mengadili perkara perceraian.. Dimana dalam proses pemeriksaan perkara pengadilan agama dipengaruhi oleh doktrin keagamaan dalam mengadili sehingga berpengaruh pada pemutusan perkara. Sehingga teori Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah *kemaslahatan* umat, dikaitkan dengan pembentukan putusan hakim yang mempertimbangkan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan ditambah dengan *kemaslahatan* bagi para pihak dan umat. Sedangkan di Pengadilan Negeri hakim memutuskan murni dengan aturan-aturan yang digunakan di Indonesia. Perbedaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun adalah terletak pada putusan yang dikeluarkan oleh setiap pengadilan.

Daftar Pustaka:

Ahmad, Kamil, & Fauzan M. *Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ainun, Siti Makiyah, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami*”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/30404/>

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Ali, Zainudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Assiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Buku Laporan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016-2019*. Madiun: 2016.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan, Iqbal. "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah, Sovia "Cara Mengajukan Hukum ke Posbakum di Pengadilan," *Hukum Online*, 14 Agustus 2018 diakses tanggal 22 Desember 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan/>
- Ilmiyah, Nurul. "Perindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3172>
- Irianto, Sulistyowati (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Cet. 1.
- Mursidah, Silmi, "Anasilis Masalah Terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27485/>
- Perdana, Riki Raya Waruwu "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," *JDIH Mahkamah Agung*, 31 Agustus 2018 diakses 23 desember 2019. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24,](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24)

Rahman, Abdur. *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.